

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian tentang Peran Tim Penggerak PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan Desa (Studi Kasus Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo tahun 2016) dapat diambil beberapa kesimpulan adalah adanya PKK di Kelurahan Doplang memberi banyak manfaat kepada kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tetapi dari kelima aspek yang diteliti yaitu yang pertama membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri kaum perempuan melalui berbagai program pelatihan, yang kedua strategi usaha dan pemasaran produk, yang ketiga memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha, keempat kaum perempuan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dan yang kelima adalah membuat usaha mikro/jaringan usaha mikro perempuan/forum pelatihan usaha.

Dari kelima aspek tersebut, hanya ada dua aspek yang bisa terpenuhi yaitu aspek pertama tentang membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri kaum perempuan, melalui berbagai program pelatihan dan juga aspek terakhir yaitu membuat usaha mikro/jaringan usaha mikro perempuan/forum pelatihan

usaha. Secara kualitas dan kuantitas paling menonjol memang hanya dua aspek tersebut, selain itu memang hanya dua aspek itu yang terlaksana, sedangkan tiga aspek lainnya tidak memiliki program kerja dan tidak dijalankan.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara secara langsung atau dokumentasi serta uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Tim penggerak PKK Kelurahan Doplang seharusnya membuat program yang lebih menarik lagi sehingga bisa meningkatkan daya partisipasi masyarakat, karena jelas untuk apa program dibuat apabila ketertarikan masyarakat untuk mengikuti program masih kurang.
2. Program-program yang bekerjasama dengan pihak-pihak swasta seperti wardah dalam pelatihan make up, tulip bakery dalam pelatihan memasak itu dipungut biaya atau menjadi ajang promosi dalam pelaksanaannya sehingga menjadikan warga semakin kurang tertarik, padahal dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 18 tentang pendanaan jelas tertera bahwa Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

3. Masih kurangnya sosialisasi atau informasi terkait strategi pemasaran kepada kaum perempuan di Kelurahan Dopleng sehingga menyulitkan kaum perempuan untuk menjual hasil kerajinannya
4. Masih kurangnya sosialisasi, informasi maupun pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi sehingga mengakibatkan kaum perempuan masih awam terkait dunia luar, padahal jika bisa dioptimalkan, teknologi informasi dan komunikasi ini bisa membantu kaum perempuan dalam mempromosikan kerajinan, memudahkan dalam mengakses informasi dan membantu kaum perempuan agar tidak gaptek.
5. Pemerintah seharusnya juga turut membantu para perempuan untuk meluaskan akses pasar terhadap produk yang dihasilkan kaum perempuan di Kelurahan Dopleng.